

**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Pengurus Pusat Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANA

Achmad Friscantono

SIRKULASI

Wara Sri Indriani
Adrian Burhan

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN**Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/
STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Optimisme di Tengah Ketidakpastian



Berbagai lembaga global memproyeksikan kondisi perekonomian global pada 2017 lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Bank Dunia (World Bank), misalnya, memprediksikan pertumbuhan ekonomi global tahun ini mencapai 2,7% dari 2,3% pada 2016. Perbaikan itu tentu akan berdampak

pada perekonomian domestik. Menurut prediksi Bank Dunia, perekonomian Indonesia tahun ini mencapai 5,3%.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tentu akan memengaruhi kinerja usaha dan bisnis para pelaku usaha di negeri ini, termasuk industri perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan nasional pada 2017 mencapai 10%-12%. Bahkan, beberapa pengamat meyakini pertumbuhan kredit bisa lebih tinggi lagi jika pertumbuhan ekonomi menembus angka 5,3%.

Begitu pun dengan kinerja keuangan lainnya. Pertumbuhan aset dan laba perbankan pada 2017 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan 2016. Sementara, angka kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)* yang sempat meningkat pada 2016, diyakini akan bisa ditekan pada tahun ini.

Optimisme membaiknya kinerja perbankan juga terlihat dari Survei Perbankan Triwulan Keempat 2016 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI). Dalam survei tersebut rata-rata responden memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2017 mencapai 13,1% (*year on year* atau *yoy*). Keyakinan itu didorong oleh meningkatnya kondisi likuiditas perbankan, masih berlanjutnya penurunan suku bunga kredit, dan prediksi makin membaiknya kondisi ekonomi.

Walau ada prospek yang lebih baik pada 2017, kondisi perekonomian tetap dibayangi ketidakpastian perekonomian global yang diperkirakan masih akan berlanjut. Di antaranya, rencana kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) yang diperkirakan naik sebanyak dua-tiga kali pada 2017 dan adanya kemungkinan penurunan harga komoditas di pasar global yang notabene merupakan produk ekspor utama Indonesia. Tantangan lainnya adalah terkait dengan berbagai kebijakan yang akan dilansir Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump; dampak British Exit (Brexit); *eurocepticism*; dan *capital outflow* dari Tiongkok.

Terkait dengan risiko kredit, berdasarkan hasil survei PricewaterhouseCoopers (PwC) terhadap bankir nasional baru-baru ini, sebagian besar responden (94%) melihat angka kredit bermasalah masih jadi tantangan terbesar pada 2017. Dan, lebih dari sepertiga responden (37%) belum bisa memutuskan atau masih merasa bahwa kredit bermasalah berada pada tingkat yang sama.

Untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik pada 2017, baik potensi maupun tantangannya, perbankan harus bisa memitigasi risiko kreditnya dengan lebih baik. Juga, memaksimalkan segmentasi dan sektor yang potensial. ■

Dari Redaksi 1

Perbanas Utama
Bergantung pada Perbaikan dan Sektor Potensial3

Perekonomian Indonesia pada 2017 diproyeksikan lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Tentu hal ini akan berdampak pada sektor perbankan yang juga diproyeksikan mampu membukukan kinerja yang lebih baik.



Infrastruktur Bisa Menjadi Penopang6

Optimistis Bukukan Kinerja Lebih Baik.....8

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan lebih baik pada 2017 memberikan “angin segar” bagi pelaku usaha di sektor perbankan. Para bankir optimistis mampu membukukan kinerja keuangan yang lebih baik.

Tumbuh Lebih Tinggi.....10

Profil

Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris BTN

Bersiap Menghadapi Perubahan.....11

Perbankan nasional harus siap menghadapi tantangan. Tidak hanya tantangan bisnis, tapi juga tantangan regulasi dan revolusi digital.



Aktualita

Menunggu Kejelasan Holding BUMN.....14

Kinerja

Mengerem Laju NPL.....16

NPL perbankan merayap naik dari 2014 hingga 2016. Sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi penyumbang kredit bermasalah paling besar dibandingkan dengan sektor lain.



Wacana

Perbankan Siap Implementasikan AEOI.....18

Upaya Menjaga Likuiditas dan Kesehatan.....20

BI berencana menerbitkan kebijakan mengenai dividen. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas dan kesehatan industri keuangan di Tanah Air.

Liputan Khusus

Reformasi Kebijakan Pangan.....22

Indonesia sejatinya mampu memiliki kemandirian dan ketahanan dalam sektor pertanian. Namun, ada sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.



Meningkatkan Akses Pembiayaan Sektor Pertanian24

Suplemen

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih

- Bank Mestika.....5
- KSP Sahabat Mitra Sejati.....7
- Bank Jateng.....19
- Bank Sahabat Sampoerna.....23

Bergantung pada Perbaikan dan Sektor Potensial



Perekonomian Indonesia pada 2017 diproyeksikan lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Tentu hal ini akan berdampak pada sektor perbankan yang juga diproyeksikan mampu membukukan kinerja yang lebih baik.

Industri perbankan nasional menghadapi sejumlah tantangan sepanjang 2016. Mulai dari perlambatan kredit hingga rasio kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*) yang meningkat. Melemahnya pertumbuhan kredit sepanjang 2016 disebabkan kurangnya permintaan kredit oleh sektor usaha di tengah perlambatan ekonomi global, terutama melemahnya perekonomian Tiongkok.

Pertumbuhan kredit perbankan pada 2016 hanya bisa didorong ke angka 7,9% dibandingkan dengan 2015, atau meningkat menjadi Rp4.377 triliun. Padahal, pada 2015 pertumbuhan kredit perbankan mencapai 10,1%.

Seiring dengan perlambatan kredit, *NPL* perbankan nasional pada 2016 pun mengalami peningkatan, dari sebelumnya sebesar 2,49% pada 2015 menjadi sebesar 2,93% pada 2016. Terkait dengan peningkatan *NPL*, perbankan pun meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai (*CKPN*) kredit menjadi sebesar 33,87% (*year on year* atau *yoy*), dari Rp110,16 triliun pada 2015 menjadi Rp147,47 triliun.

Melalui sejumlah kebijakan, baik oleh pemerintah maupun pemangku kebijakan terkait, perekonomian Indonesia pada 2017 diharapkan bisa lebih baik ketimbang pada 2016.

Misalnya saja, serangkaian reformasi kebijakan fiskal dan iklim usaha diperkirakan bakal meningkatkan ekonomi Indonesia.

Walaupun masih dibayangi sejumlah tantangan dan risiko terkait dengan ketidakpastian ekonomi global pada 2017, Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 akan lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada 2017 diproyeksikan bisa mencapai 5,3%.

Bank Dunia menilai kredibilitas kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia telah membaik. Selain itu, penetapan sasaran penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dinilai lebih realistis. Dalam anggaran tersebut terdapat perbaikan mutu belanja pemerintah Indonesia, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial, serta menetapkan sasaran yang lebih baik untuk subsidi energi dan program bantuan sosial masyarakat miskin.

Sementara itu, Badan Moneter Internasional (International Monetary Fund atau IMF) melalui hasil *assessment* konsultasi tahunan (IMF Article IV Consultation) menyatakan

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 diperkirakan sebesar 5,1%. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi swasta dan investasi swasta yang perlahan membaik, merespons perbaikan harga komoditas dan suku bunga yang lebih rendah.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, selain terus memperbaiki kebijakan ekonomi dan fiskal, Fitch Rating Indonesia menilai pemerintah harus bisa mendorong sektor-sektor industri yang potensial. Menurut Fitch, ada lima sektor yang menjadi fokus utama. Kelima sektor tersebut ialah sektor ritel, otomotif, properti, konstruksi, dan sektor *airport*/pelabuhan.

Nah, dari lima sektor tersebut, terdapat tiga sektor yang akan menjadi pendongkrak utama ekonomi. Pertama, sektor properti. Sektor ini diperkirakan membaik, yang didukung oleh meningkatnya sentimen konsumen dan kebijakan pemerintah. Kedua, sektor konstruksi. Proyek infrastruktur dari pemerintah akan terus menjadi katalis dalam jangka pendek. BUMN diperkirakan akan menjadi penggerak utama. Ketiga, sektor *airport*/pelabuhan. Dalam hal ini, sektor ini dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan pengelola yang meningkat untuk mendanai kebutuhan belanja modalnya.

Selain itu, Fitch mengemukakan bahwa kemenangan Donald Trump meningkatkan ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat (AS) pada masa mendatang yang tentunya akan berdampak pada ekonomi global. Respons atas kebijakan tersebut akan menjadi kunci untuk sensitivitas *outlook* pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan ekonomi pada 2017 tentu akan berdampak positif pada industri perbankan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pertumbuhan kredit tahun ini akan mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun lalu. OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2017 akan mencapai 9%-12%.

Berdasarkan data OJK, pertumbuhan kredit Januari 2017 secara *yoy* sudah berada di angka 10%. OJK memperkirakan pertumbuhan kredit akan berada di atas 8,5% secara *year on year (yoy)* pada kuartal/triwulan pertama 2017.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon, pertumbuhan kredit pada 2017 akan melanjutkan tren positif. “*Kan* yang baru ada itu di Januari, prediksinya *sih* pertumbuhannya tetap positif. Secara *yoy*-nya mungkin bisa di atas 8,5% pada kuartal pertama 2017,” ujarnya.

Nelson memperkirakan kemampuan perbankan dalam membukukan laba bersih (rentabilitas) tahun ini akan membaik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Membaiknya rentabilitas perbankan tersebut antara lain didorong oleh menurunnya kebutuhan pencadangan.

“Pembentukan cadangan akan jauh menurun sehingga rentabilitas bank tahun ini akan membaik, meski *NIM (net interest margin)* akan kembali ke kisaran 5%-5,5%. Untuk peningkatan *NIM* tahun lalu sifatnya temporer,” terangnya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat setidaknya



Pembangunan perumahan; sektor potensial

ada tiga potensi ekonomi yang harus dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Pertama, adanya kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makro-ekonomi, termasuk pengelolaan kebijakan fiskal dengan target yang realistis dan bervisi jangka menengah panjang, serta kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makro-ekonomi, menjadi salah satu penopang utama kepercayaan dan keyakinan para pelaku ekonomi tersebut. Di samping itu, keyakinan pelaku ekonomi didorong oleh berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini.

Kedua, munculnya sumber pembiayaan ekonomi yang luar biasa. Dalam hal ini, apresiasi perlu diberikan kepada pemerintah yang berhasil menyingkap potensi ini melalui program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Potensi ini dapat menjadi momentum kuat bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi perpajakan di Indonesia. Perluasan basis pajak yang dicapai melalui program *tax amnesty* diharapkan diikuti dengan intensifikasi pajak guna makin meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Di Indonesia peran pajak dalam pembiayaan pembangunan baru mencapai 11% dari produk domestik bruto (PDB) 2015, lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian berbagai negara kawasan, seperti Singapura dan Malaysia yang mencapai sekitar 14% dari PDB. BI meyakini intensifikasi pajak dengan memanfaatkan basis pajak yang lebih luas akan menjadi modal penting bagi upaya memperlebar ruang fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, tanpa mengganggu prospek kesinambungannya.

Ketiga, munculnya potensi teknologi digital yang berkembang pesat. Sepanjang 2016 kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* meningkat pesat sebagaimana terlihat dari aktivitas *financial technology (fintech)* dan *e-commerce*. Jika perkembangan positif ini bisa dimanfaatkan dengan tepat, hal itu dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik.

Ketiga potensi tersebut apabila dimanfaatkan dengan efektif dan optimal, tentu akan makin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang

sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Berkenaan dengan potensi SDM, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pasar yang besar dalam menopang permintaan domestik melalui konsumsi rumah tangga. Tidak berhenti di situ, potensi pasar yang besar tersebut akan siap menjadi penghela penciptaan nilai tambah yang lebih besar, bila kemudian diikuti dengan peningkatan kegiatan produksi domestik.

Optimistis Lebih Baik

Kinerja industri perbankan pada tahun ini diprediksi mulai melaju dan mengalami perbaikan. Perbaikan kinerja, terutama kualitas kredit perbankan, bakal menjadi faktor utama perbankan dalam mendukung perekonomian nasional.

Gundy Cahyadi, ekonom DBS Group Research, mengatakan tren penurunan rasio kredit bermasalah terus mengalami perbaikan hingga saat ini. Kemungkinan hingga akhir 2017 angkanya jauh lebih baik ketimbang 2016. Dia meyakini tingkat kredit bermasalah perbankan pada tahun ini akan jauh lebih baik seiring dengan laju perkreditan yang diprediksi akan lebih tinggi daripada tahun lalu yang hanya sebesar 7,87%. DBS Research memprediksi pertumbuhan kredit tahun ini bisa mencapai angka 12%.

“Laju pertumbuhan rasio kredit bermasalah akan turun karena ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang membaik. Ditambah, masalah utama *NPL* adalah komoditas, sekarang harga komoditas juga mulai membaik,” ungkapnya.

Berdasarkan data, memang kualitas kredit perbankan cukup tertekan sepanjang tahun lalu, dengan tingkat *NPL* tertinggi mencapai 3,22% pada Agustus 2016. Perlambatan ekspansi kredit yang rendah pada tahun lalu turut memberikan andil terhadap kenaikan *NPL*.

Sementara itu, menurut catatan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan terhadap bankir-bankir nasional, sebanyak lebih dari 50% responden mengharapkan pertumbuhan kredit hingga *double digit* atau minimal 10% pada tahun ini. Menurut David Wake, Financial Services Industry Leader PwC Indonesia, hasil survei tersebut masih sejalan dengan kondisi pasar—dalam hal ini para regulator pun, seperti OJK dan BI, juga memproyeksikan kredit dapat tumbuh *double digit* pada tahun ini.

“Pertumbuhan kredit yang mencapai sebesar 10%-15% masih lebih rendah dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Tapi, separuh responden mengharapkan pertumbuhan sebesar 10% atau lebih pada tahun ini,” ujarnya.

Terkait dengan risiko kredit, sebagian besar responden melihat kredit bermasalah akan menurun pada 2017. Kendati demikian, kekhawatiran para responden terhadap kredit bermasalah masih dianggap sebagai tantangan terbesar atau tertinggi (sebanyak 94%). “Lebih dari sepertiga responden atau 37% ada yang belum bisa memutuskan atau masih merasa bahwa kredit bermasalah masih berada pada tingkat yang sama,” ungkapnya. ■



DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

PT.BANK MESTIKA DHARMA, Tbk - TAHUN 2016
(psl 6 ayat 1 huruf h, UU No.36 Tahun 2008 ttg Pajak Penghasilan)

NAMA	JUMLAH SALDO (Rp)	NAMA	JUMLAH SALDO (Rp)	NAMA	JUMLAH SALDO (Rp)
ANUGRAH MAHKOTA ABADI PT	1.531.818.750	SUSIYANTI	4.500.000	HOTMA SIMATUPANG	126.333.726
RUSLAN	4.220.510.123	JONO	698.036.000	IKHWAN PASARIBU	68.150.817
MAJU JAYA CV	2.655.254.137	KAMALUDDIN RITONGA	1.000.000.000	ROSIP SIREGAR	247.665.595
SUPRIATY	880.173.596	USMAN	472.433.977	DOLLY TUERAH, SE	134.702.669
NICKY HUIRYANTO	693.900.000	SEDERHANA SURBAKTI	514.642.914	SUTEDY	144.310.236
FAISAL DALIMUNTHE	484.373.515	KAMRUL	314.102.216	SYAFARUDDIN	131.865.264
HASTINA SE	3.185.331.280	WAGIONO	444.489.999	RIAU GRAHA MASINDO PT	13.882.378.790
BEN CERGAS	2.448.354.419	RYADI SUKARYA	715.918.142	SUGIARTO	202.540.000
PUTRA TANJUNG PURA PT	14.121.309.692	BADRIMAN	408.350.625	SUKAMAJU HUTANI LESTARI	295.527.210
M NATSIR	688.840.139	INDRA JASA	547.538.084	SUKAMAJU METALINDO MANDIRI	249.003.456
BARATA JATILUHUR PT	314.031.269	MESYANTO	327.961.302	ARIEF PANDAPOTAN PAKPAHAN	289.949.466
MUSLIM	250.114.908	SUYADI	692.707.776	AGUSSALIM	412.630.907
WILLY ONG	726.911.498	ASHABUL RAMBE	982.475.296	TUMIN NGADI	463.095.616
TJHIA TJEN TEN	1.335.587.394	LUSIANA JUNI KARTANTI	461.683.678	FANDHI MOULANA	62.086.806
SUPRAYETNO	459.516.866	RUBIANTI	652.773.102	MITRA KAMPAR BERSATU PT	3.039.617.249
STEFANUS SURBAKTI	413.161.451	HERI ISWANTO	939.364.954	RINI LASMARIA	44.862.170
JONY	858.788.970	AMAR HIJAL NASUTION	635.222.413	HARTYA KARYA ABADI	388.501.333
AGUS YEN	371.150.063	SRI SUWANDARI	20.553.655	YUHENDRI	308.136.000
IMELDA CV	881.476.066	PONIRIN	948.858.268	JOHNY TUERAH	3.030.723.609
BOLLUSSON PARUNGKILAN PASARIBU	86.905.675	PONIRAN	905.797.728	M SHOLEH	900.034.000
KARYA ANUGRAH REZEKI BERSAMA PT	1.672.542.321	SUWARTIK	948.858.268	USMAN SYARIF	300.060.000
MURDIONO	1.278.665.186	BUDI SUMARNO	948.858.268	SAPARUDDIN	649.380.000
ABDY TABAHAN JAYA	164.090.674	MUHAMMAD ARIF SIREGAR	1.877.545.136	ARNOLD EKA PUTRA	417.281.797
IKA TRISNAWATI SIRAIT	302.685.609	DANI SUMANTI	497.999.000	RAFDINAL	382.791.950
ERPHAN JOHAN	230.753.691	SUPRIADI	264.875.173	SYAMSUL BACHRI	1.014.333.333
SUDIANTO	372.095.034	ARIPIN SIREGAR	8.342.989.391	NADHIFUL JAMIL	607.541.213
PACIFIC PRIMA COAL PT	36.121.999.073	MESWAN	124.143.026	NURAHMAD	167.954.000
WILSON TIO	610.893.090	GIOMIRATANA	192.595.475	VINA	763.615.814
POLTAK SILALAH SE	1.583.008.260	HOTLAN SILITONGA	261.043.846	DAVID EDYNATA	1.954.955.343
HERMANTO	4.100.000.000	SUGIARMI	193.363.945	ELIN HERLINA	713.301.911
BARA JAYA ENERDY PT	49.552.770.796	SYAHRUL RIZAL SIREGAR	993.000.000	JEANY PONGRESSA PASULU	60.980.201
EDY	222.361.061	MARA TOGUAN SIREGAR H	789.796.529	ARTHA WARSITO DUTA CV	591.816.207
FRANKY NAULI	618.243.362	ROS REFLITA	592.080.961	T DAUD MAURITZ NAINGGOLAN	764.016.000
GEK HUAN	555.767.631	MESIAH	216.524.055	SURYA JAYA PLASTINDO UD	31.000.000.000
				TOTAL	225.734.611.488

Infrastruktur Bisa Menjadi Penopang

Walau diproyeksikan lebih baik, bisnis perbankan pada 2017 masih menghadapi tantangan. Untuk penyaluran kredit, infrastruktur dinilai memiliki potensi yang sangat besar.

Seiring dengan membaiknya ekonomi yang terjadi pada akhir 2016, para pelaku usaha di negeri ini pun optimistis bahwa potensi dan proyeksi ekonomi atau bisnis pada 2017 akan lebih baik ketimbang pada 2016. "Survei Perbankan Triwulan Keempat 2016" yang dilakukan Bank Indonesia (BI) menunjukkan akan hal itu.

Dari hasil survei BI, responden memperkirakan rata-rata pertumbuhan kredit perbankan pada 2017 mencapai 13,1% (*year on year* atau *yoy*). Artinya, pertumbuhan kredit sepanjang 2017 akan meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan kredit pada 2016 yang hanya sebesar 7,9%. Optimisme tersebut terutama didorong oleh meningkatnya kondisi likuiditas perbankan, masih berlanjutnya penurunan suku bunga kredit, dan diperkirakan makin membaiknya kondisi ekonomi.

Namun, penyaluran kredit masih melambat pada triwulan pertama 2017 sesuai dengan pola historis awal tahun. Peningkatan pertumbuhan kredit baru terjadi pada triwulan berikutnya.

Terkait dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), responden memperkirakan pertumbuhan triwulanan DPK meningkat pada triwulan pertama 2017. Perkembangan DPK ini dipengaruhi oleh suku bunga dana—yang meskipun menurun, dinilai masih menarik oleh nasabah—serta peningkatan pelayanan bank.

David Sumual, pengamat ekonomi dari Bank Central Asia (BCA), mengatakan, tahun ini lebih dipandang sebagai tahun rasional. Dia menilai pertumbuhan ekonomi bisa digenjut hingga 5,3% itu sudah cukup maksimal.

Menurutnya, pada 2017 dan tahun-tahun mendatang Indonesia masih dibayangi oleh beberapa hambatan ataupun tantangan. Pertama, faktor global. Kebijakan pembatasan ekonomi Amerika Serikat (AS) oleh Donald Trump bisa menjadi ancaman beberapa negara mitranya. Kedua, faktor domestik. Beberapa tekanan akan terjadi terhadap inflasi pada 2017. Ini lebih dikarenakan akan adanya kenaikan harga tarif dasar listrik, cukai rokok, bahan bakar minyak (BBM), dan beberapa hal lainnya.

Sementara itu, Aviliani, pengamat ekonomi, memproyeksikan geliat pertumbuhan industri perbankan pada 2017 masih



Proyek konstruksi; sektor eceran juga menggeliat

stagnan. Pertumbuhan industri perbankan diproyeksikan hanya mampu menembus level 10%. Hal tersebut dapat tercapai jika lembaga perbankan mengubah sebaran kreditnya ke sektor infrastruktur, properti, dan transportasi.

Dia mengatakan jika semua sektor tersebut dapat digerakkan, sektor lainnya pun akan bergerak. Dampaknya, kebutuhan kredit perbankan akan mengalami peningkatan. Upaya ini diperkirakan mampu mengerek kinerja perbankan menjadi lebih baik lagi.

Stagnannya penyaluran kredit perbankan dinilai karena adanya perlambatan pada sektor manufaktur. Pasalnya, selama ini sektor manufaktur merupakan primadona bagi penyaluran kredit perbankan, khususnya yang berbasis *consumer goods*.

Selain penyaluran kredit, perbankan masih memiliki tantangan likuiditas. Rencana kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) pada tahun ini dinilai menjadi penyebab dan berdampak negatif pada industri perbankan.

Menurut Frederik Rasali, analis Panin Securities, peningkatan suku bunga FFR ini berpeluang mengerek *yield* sehingga biaya dana atau *cost of fund* perbankan akan naik. Kendati demikian, dia menilai hal ini hanya berdampak pada bank menengah, sedangkan untuk bank-bank besar dan memiliki permodalan yang kuat akan jauh lebih mudah mendapatkan dana.

Karena itu, Frederik mengingatkan bahwa kondisi likuiditas perbankan sepanjang 2017 masih ketat. Dia memproyeksikan pada 2017 perbankan akan mengeluarkan banyak instrumen untuk mencari pendanaan, seperti *medium term notes*, *negotiable certificate of deposit*, dan utang bilateral dari bank lain.

Jika suku bunga FFR naik, hal itu akan mendorong kenaikan suku bunga acuan BI, BI-7 Day Repo Rate. Analisis Trimegah Securities, Angga Aditya Assaf, mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi adanya dana keluar (*capital outflow*). "Ditambah dengan gencarnya bank akan memacu kredit pada 2017, ini akan membuat likuiditas bank mengetat," katanya.

Potensi ketatnya likuiditas perbankan pada 2017 ini membuat bank-bank harus berkompetisi untuk memperebutkan dana dengan menaikkan suku bunga deposito. Diproyeksikan kenaikan suku bunga deposito ini akan bervariasi pada setiap bank. Suku bunga deposito bank besar diproyeksikan akan naik antara 10 dan 25 *basis points (bps)*, atau 0,1%-0,25%. Untuk bank kecil diproyeksikan dampaknya akan besar, yakni sekitar 25 *bps* sampai dengan 50 *bps*.

Potensi 2017

Menurut Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI), pertumbuhan kredit didorong oleh serapan kredit di sektor infrastruktur pemerintah yang berdampak ganda pada permintaan kredit ke subsektor lainnya, seperti



Ryan Kiryanto; berdampak ganda

bangunan, konstruksi, dan material. Dia memproyeksikan, sesuai dengan kondisi perekonomian dan potensi, pertumbuhan kredit pada 2017 bisa mencapai 10%-12%.

Potensi pembangunan infrastruktur sepanjang 2017 dinilai sangat besar, mengingat banyak program pembangunan yang sedang dijalankan dan telah dicanangkan, misalnya pembangunan sejumlah sarana dan prasarana dalam rangka Asian Games 2018. Ditambah lagi, sektor eceran juga akan menggeliat sebagai dampak aktivitas ekonomi.

Apalagi dengan membaiknya indeks kepercayaan konsumen melalui survei AC Nielsen. Dengan demikian, kombinasi permintaan kredit produktif dari segmen *wholesale*, *middle*, dan usaha kecil dan menengah (UKM), baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, akan membaik. Disertai juga dengan perbaikan serapan kredit konsumtif di sektor ritel.

Selain itu, pertumbuhan kredit akan ditopang oleh permintaan kendaraan roda empat dan dua yang akan meningkat. Permintaan kredit pemilihan rumah (KPR) dan permintaan terhadap keperluan rumah tangga juga diperkirakan membaik.

Tak ketinggalan sektor pariwisata juga akan menggeliat, terutama setelah ditetapkan 10 daerah destinasi wisata unggulan. Alhasil, sektor transportasi, perdagangan, dan perhotelan (*hospitality*) juga akan membaik. ■



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSP SMS) mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

Tahun 2016 Rp. 20.672.005.036,-

Rincian Daftar Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagaimana tercatat di KSP SMS, akan diserahkan ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga bersamaan dengan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagai Lampiran.

Optimistis Bukukan Kinerja Lebih Baik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan lebih baik pada 2017 memberikan “angin segar” bagi pelaku usaha di sektor perbankan. Para bankir optimistis mampu membukukan kinerja keuangan yang lebih baik.

Perekonomian Indonesia tahun ini diperkirakan lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 5,1%. Bank Dunia (World Bank) bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai angka 5,35% pada 2017.

Perbaikan ekonomi tentu akan berdampak pada peningkatan kinerja sektor usaha, termasuk perbankan. Industri perbankan nasional sendiri optimistis mampu membukukan kinerja keuangan yang lebih baik pada 2017. Lantas, apa target yang ingin dicapai industri perbankan? Bagaimana strategi pencapaiannya? Berikut ini pendapat beberapa bankir.

Herwidayatmo,
Presiden Direktur PaninBank

Optimistis Kredit Tumbuh Lebih Baik

Presiden Direktur PT Bank Panin Tbk (PaninBank), Herwidayatmo, mengaku optimistis pertumbuhan kredit PaninBank pada 2017 lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2016 kredit bank ini tercatat tumbuh 6,14% dibandingkan dengan 2015 atau meningkat menjadi Rp134,63 triliun. Demikian pula dengan dana pihak ketiga (DPK)-nya. Sepanjang 2016 DPK PaninBank tercatat tumbuh 11,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp142,65 triliun.

Salah satu program yang diandalkan PaninBank untuk meningkatkan pundi-pundi DPK-nya adalah Panin Super Bonanza, yakni program undian berhadiah. PaninBank tercatat telah menggelar Panin Super Bonanza selama lima kali sejak kali pertama diperkenalkan pada 2012.

“Alhamdulillah, di dalam situasi yang seperti ini, kami masih menunjukkan peningkatan dari sisi DPK maupun kredit



pada tahun lalu. Ke depan kami optimistis kredit kami akan tumbuh lebih (dari) 6% pada tahun ini,” ungkapnya.

Untuk memacu pertumbuhan kredit, Herwidayatmo mengatakan, PaninBank akan fokus pada kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor. Pertumbuhan kredit konsumen tahun ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan laba bank ini.

Sementara itu, terkait dengan DPK, PaninBank yakin bisa meningkatkan porsi dana murah (*current account, saving account* atau *CASA*)-nya menjadi 50% dari total DPK. “Pada tahun ini kami mempunyai target komposisi tabungan dan giro meningkat. Porsinya dapat meningkat dari 40% ke posisi 50% dari total DPK,” terangnya.

Untuk mencapai target tersebut, ada beberapa strategi yang ditempuh PaninBank tahun ini. Di antaranya, perusahaan akan menggenjot dana murah melalui produk tabungannya yang menasar segmen *mass affluent*, yakni penabung dengan pasar luas di Indonesia. Salah satunya, melalui program undian berhadiah Panin Super Bonanza.

PaninBank juga akan terus melakukan pengembangan digital. Untuk mengembangkan *mobile banking* dan *internet banking*, PaninBank meluncurkan rangkaian produk dan layanan dengan memanfaatkan dua produk unggulan Fiserv, yakni Mobliti™ dan Corillian™ Online.

Pengembangan solusi perbankan digital *multi channel* yang inovatif ini dilakukan untuk membantu nasabah mengelola keuangan mereka dengan cepat dan aman. Dengan begitu, transaksi nasabah akan lebih mudah, nyaman, dan cepat.

Benny Purnomo,
Presiden Direktur MNC Bank

Fokus dan Inovasi



Pada 2017 PT Bank MNC Internasional (MNC Bank) menargetkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 12% atau menjadi Rp11,5 triliun dari Rp10,3 triliun pada 2016. Sedangkan, untuk penyaluran kredit, bank ini menargetkan pertumbuhan sebesar 15% dibandingkan dengan realisasi penyaluran kredit tahun lalu yang tercatat Rp7,9 triliun.

Menurut Benny Purnomo,
Presiden Direktur MNC Bank,

perseroan akan lebih memfokuskan target bisnis pada segmen ritel dan konsumen untuk mencapai target pertumbuhan DPK sepanjang 2017. MNC Bank juga akan fokus pada pengembangan inovasi produk dan layanan berbasis digital atau teknologi informasi (TI), mengingat pesatnya perkembangan teknologi saat ini.

Terkait dengan hal itu, MNC Bank telah meluncurkan aplikasi Punya Celengan yang ditujukan bagi segmen keluarga yang memiliki anak usia 7-15 tahun. Aplikasi tersebut merupakan bagian dari program *financial literacy* untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran menabung sejak usia dini.

Aplikasi Punya Celengan diharapkan dapat membantu nasabah MNC Bank dalam memberikan pendidikan tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar kepada anak-anaknya. Bagi MNC Bank, Punya Celengan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah nasabah dan porsi dana murah.

Strategi yang sama pun akan ditempuh untuk meningkatkan penyaluran kredit. Demi mendorong pertumbuhan kredit tahun ini, perseroan bakal memfokuskan target bisnis pada segmen *retail and consumer* yang berlandaskan inovasi digital. “Kami optimistis, dengan terus melakukan inovasi dalam hal produk serta layanan, kami dapat mendukung pemenuhan target kinerja 2017,” tuturnya.

Dengan berbagai pengembangan dan strategi, MNC Bank terus menunjukkan kinerja positif sejak awal berdiri pada 2014. Berdasarkan data hingga akhir 2016 (*unaudited*), MNC Bank telah menyalurkan kredit senilai Rp7,9 triliun atau meningkat 12,83% dari tahun sebelumnya.

Maryono,
Direktur Utama BTN

Terus Tumbuh dan Transformasi Digital



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis fungsi intermediasi perseroan akan lebih menggeliat tahun ini. Kredit BTN diperkirakan tumbuh jauh di atas rencana pertumbuhan rata-rata industri perbankan yang dicatat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni pada kisaran 9%-12% sepanjang 2017.

“Kami secara umum dapat memenuhi target dari yang ditetapkan pada 2016.

Keberhasilan inilah yang mendorong BTN optimistis menyambut 2017 dengan target bisnis yang cukup menantang,” ujar Maryono, Direktur Utama BTN.

Menurut Maryono, perseroan optimistis pertumbuhan kredit tahun ini di atas 20% dengan rasio kredit bermasalah (*non*

performing loan atau *NPL*) di bawah 3%. Laba perseroan pun ditargetkan lebih baik daripada capaian tahun lalu.

Berkaitan dengan optimisme tersebut, BTN meyakini bahwa pemenuhan kebutuhan hunian (*backlog* perumahan) nasional dan pemenuhan kebutuhan non-KPR adalah peluang bisnis yang besar bagi perseroan. Untuk mendukung penyaluran kredit, BTN akan memperkuat manajemen perkreditan berbasis manajemen risiko agar menghasilkan kinerja yang positif dengan perolehan laba yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan perseroan.

Selain menetapkan target kinerja keuangan yang lebih baik, BTN akan terus mendorong transformasi bisnis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. BTN akan memprioritaskan transformasi bisnis berbasis *digital banking* guna mendukung *core business* dalam mendorong pemenuhan Program Sejuta Rumah. Langkah ini ditempuh untuk memperbaiki proses bisnis agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat sejalan dengan persaingan perbankan yang kian ketat.

BTN sangat serius menjalankan transformasi *digital banking*. Hal itu terlihat dari tema yang diangkat dalam Rapat Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2017. “Kami harus dapat masuk dalam era persaingan itu. Dan, BTN telah siap menyambut persaingan itu dengan bisnis perseroan yang sudah disiapkan berbasis *digital banking*,” ungkapnya.

Tumbuh Lebih Tinggi

OJK menilai, hingga awal 2017, stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga dengan baik.

Memasuki awal 2017, pemulihan ekonomi negara *advanced economies* terpantau makin solid, khususnya di Amerika Serikat (AS). Hal itu menguatkan ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih cepat. Sementara, negara *emerging market* masih menghadapi tantangan dalam proses pemulihannya.

Namun demikian, sentimen percepatan kenaikan FFR belum terlihat dampaknya secara signifikan di pasar keuangan, baik global maupun domestik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pun menilai, stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia dalam kondisi terjaga. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mencatatkan peningkatan sebesar 1,75% (*month to month* atau *mtm*). Sementara, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) relatif stabil.

Pertumbuhan ekonomi domestik sepanjang 2017 pun diperkirakan meningkat sejalan dengan proyeksi pembangunan infrastruktur dan perbaikan harga komoditas. OJK akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mengambil langkah antisipatif terkait dengan kondisi ekonomi global yang dapat memengaruhi sektor jasa keuangan, seperti kebijakan AS, hasil pemilu negara Eropa, dan potensi devaluasi yuan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan intermediasi lembaga jasa keuangan (perbankan) menunjukkan peningkatan. Hingga posisi Januari 2017, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 10,04% (*year on year* atau *yoy*) dan penyaluran kredit tercatat tumbuh 8,28% secara *yoy*.

Peningkatan intermediasi tampaknya dibarengi dengan kualitas penyaluran dana yang tetap terjaga. Lihat saja, per Januari 2017 rasio kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*) perbankan tercatat hanya 3,09% (*gross*) dan 1,35% (*net*). Selain itu, permodalan masih berada pada level yang



Irwan Lubis; tumbuh satu digit

memadai. Kecukupan modal (*capital adequacy ratio* atau *CAR*) perbankan per Januari 2017 pun tercatat cukup tinggi, yakni 23,21%.

Walau demikian, ada beberapa *downside risks* yang perlu diperhatikan. Di antaranya, potensi kenaikan tekanan inflasi yang didorong oleh kenaikan tarif listrik dan faktor cuaca serta prospek kinerja sektor eksternal yang terekspos dengan penurunan harga beberapa komoditas andalan ekspor.

Di tengah upaya peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, OJK akan terus memantau berbagai perkembangan yang terjadi, baik di tataran global maupun domestik. Selain itu, OJK akan mempersiapkan

langkah-langkah mitigasi yang diperlukan agar tidak menimbulkan tekanan pada stabilitas sistem keuangan.

OJK optimistis kinerja bank pada 2017 akan lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. OJK memperkirakan, pertumbuhan kredit bank umum tahun ini mencapai 10%-12% atau meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 7,87% (*yoy*).

Meningkatnya kredit perbankan tentu akan meningkatkan laba perbankan pada 2017. Sebagai informasi, tahun lalu laba bersih bank umum mencapai Rp106,54 triliun atau tumbuh 1,83% secara *yoy* dibandingkan dengan 2015 yang tercatat Rp104,63 triliun. Capaian laba itu ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 11,19% menjadi Rp342,84 triliun dari Rp308,35 triliun pada 2015.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan OJK, Irwan Lubis, memperkirakan, secara rata-rata, pertumbuhan laba perbankan tahun ini masih satu digit. "Tahun lalu ada beberapa bank yang mengalami kerugian dan penurunan laba karena pembentukan pencadangan. Namun, pada 2017 diharapkan laba meningkat, meski kemungkinan pertumbuhannya masih satu digit di RBB (rencana bisnis bank)," ungkapnya. ■

Lucky Fathul Aziz Hadibrata, Komisaris BTN

Bersiap Menghadapi Perubahan

Perbankan nasional harus siap menghadapi tantangan. Tidak hanya tantangan bisnis, tapi juga tantangan regulasi dan revolusi digital.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum juga kembali mencapai titik tertinggi membuat pelaku usaha di semua sektor industri harus bekerja keras dalam menjalankan bisnisnya. Tidak terkecuali sektor perbankan yang pertumbuhannya sedikit melambat sepanjang 2016.

Lucky Fathul Aziz Hadibrata, Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN) mengatakan, meski memiliki fundamental ekonomi yang baik, tantangan yang datang dari berbagai arah ikut memberikan dampak yang berarti terhadap industri perbankan. Salah satunya ialah kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), *Fed Fund Rate*, yang membuat banyak dana asing keluar dari negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Transaksi keuangan global yang makin sering terjadi di dalam negeri memaksa pelaku industri harus mengikuti keinginan pasar. Banyak perubahan mendasar dan transformasi yang harus dilakukan oleh para bankir di Tanah Air agar tidak kian tertinggal oleh negara-negara berkembang, apalagi negara maju.

“Kompleksitas sistem keuangan dunia membuat kita harus segera melakukan perubahan. Tidak hanya dari sisi bisnis, regulasi juga harus mendukung agar semuanya mampu bersaing secara sehat,” jelas Lucky ketika ditemui di kantornya.

Menurutnya, masih banyak regulasi yang harus dibenahi saat ini guna mendukung perkembangan industri perbankan di negeri ini. Hingga saat ini, masih belum ada tanda-tanda bahwa para regulator di industri keuangan, terutama perbankan, melakukan langkah-langkah yang sinergis.

Pelaku di sektor perbankan masih perlu menata struktur organisasinya lebih baik lagi agar memiliki peran penting sebagai mitra kritis regulator. Sampai dengan sekarang, hal ini belum bisa terealisasi karena kondisi internal yang masih belum tertata dengan baik.

Lalu, seperti apa langkah-langkah perubahan itu harus dilakukan? Bagaimana kesiapan pelaku industri perbankan menghadapi perubahan tersebut? Berikut wawancara *Probank* dengan Lucky Fathul Aziz Hadibrata. Petikannya:



Bagaimana kondisi perbankan nasional saat ini?

Kalau melihat kondisi saat ini, fundamental ekonomi bagus. Ini adalah peluang yang sangat baik bagi industri perbankan nasional. Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio* atau *CAR*) industri sudah baik, mencapai 23,12% dan kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*) sebesar 3,18%.

Tapi, masih ada kondisi eksternal yang memengaruhi. Ini akan memunculkan *VUCA*, yakni *volatility*, *uncertainty*, *complexity*, dan *ambiguity*. Itu adalah konsep dunia yang penuh ketidakpastian, kompleks, dan bias.

Apa yang harus dilakukan agar industri bisa terus tumbuh?

Kita perlu kejelasan arah kebijakan OJK, BI, dan LPS secara terpadu. Perlu ada kepastian mengenai tidak adanya tumpang tindih antara produk dan aktivitas regulator. Jangan sampai produk dan regulasi yang dikeluarkan regulator justru menghambat industri. Untuk itu, perlu dibuatkan perizinan satu atap dari para regulator. Ini akan memberikan arah yang jelas dalam masa depan produk.

Perlu ada data *warehouse* yang dimiliki oleh BI, OJK, dan LPS. Pada akhir hari, data ini semua harus sesuai. Semua itu memang tantangan bagi regulator, pada awalnya. Ke depannya, itu akan menguntungkan semua pelaku industri.

Regulator harus punya *roadmap* industri keuangan, khususnya perbankan. Orientasi dari *roadmap* ini harus jelas, baik lokal maupun global. Hal ini juga harus disepakati oleh BI, OJK, dan LPS agar tumpang tindih produk dan regulasi tidak terjadi lagi. Selain itu, segmentasi yang ditujukan untuk perbankan harus jelas. Jangan sampai semua perbankan, baik besar maupun kecil, bertarung di wadah yang sama.

Apa saja tantangan yang akan terjadi pada industri perbankan ke depan?

Beberapa tantangan yang sudah ada di depan kita ialah kondisi keuangan dan moneter, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan lainnya ialah perputaran dana yang cepat itu



menjadi masalah juga. Berikutnya masih ada revolusi teknologi, disusul juga transaksi keuangan yang cepat dan *borderless*, dan terakhir ialah *financial inclusion* dan perlindungan konsumen.

Banyaknya tantangan yang ada tadi membuat industri perbankan harus segera berubah mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak akan lagi mampu bersaing, apalagi kalau cara kerjanya masih konvensional. Kita akan tergerus oleh layanan *financial technology* (*fintech*) dan perusahaan *start up* yang bergerak di sektor keuangan. Untuk itu, perbankan harus siap menghadapi reformasi industri

dengan menyiapkan reposisi,

refocusing, dan reorientasi.

Apa yang harus dilakukan industri perbankan?

Kita harus mengarah juga ke digitalisasi. Memang, perbankan tidak akan bisa beralih untuk mengambil *fintech* secara langsung. Jadi, perbankan akan membuat anak

perusahaan untuk bisa menyalurkan pembiayaan kepada para pemain *start up* atau *fintech*. Nantinya, *fintech* akan bekerja sama dengan banyak mitra dan mampu menggaet banyak nasabah dari sana. Lagi pula, kebanyakan mitra yang digandeng *fintech* adalah pelaku UMKM.

Seperti yang sudah dikatakan Darmin Nasution, Indonesia akan mengarah ke ekonomi digital pada 2020. Dari sana akan tumbuh 1.000 *start up* baru yang transaksinya mencapai US\$135 miliar. Kalau hal ini tidak ditangkap oleh perbankan konvensional saat ini, perbankan akan habis.

Oleh sebab itu, perbankan harus mengubah orientasinya dari konvensional mengarah ke digital. Kita bukan lagi bicara kartu, melainkan sudah pindah ke *smartphone* dan yang lainnya. Itulah kondisi nyata yang harus dihadapi perbankan. Di samping itu, antarperbankan masih harus bersaing dalam menjalankan bisnisnya.

Ada strategi khusus untuk menghadapi persaingan tadi?
Setidaknya ada tiga orientasi utama yang harus dilakukan

Kompleksitas sistem keuangan dunia membuat kita harus segera melakukan perubahan. Tidak hanya dari sisi bisnis, regulasi juga harus mendukung agar semuanya mampu bersaing secara sehat.

perbankan dalam menghadapi persaingan. Pertama adalah *repositioning*. Perbankan harus tahu industri apa yang akan dimasukinya dan kategori bisnis apa yang akan menjadi pasar utamanya. Setiap perbankan harus mulai bergerak dari zona zamannya untuk mengetahui posisinya akan ada di mana pada masa mendatang.

Salah satu target yang akan dicapai dari reposisi ini ialah menaikkan posisi BTN menjadi bank terbesar kelima dalam waktu dekat. Saat ini kami masih berada di posisi keenam. Kami juga harus menjadi yang terdepan untuk sektor perumahan.

Kedua adalah *refocusing*. Ini yang sudah dilakukan BTN untuk tetap fokus pada sektor perumahan. Tidak hanya perumahan, semua sektor industri yang terkait dengan sektor perumahan akan menjadi fokus BTN dalam menjalankan bisnisnya. Memang masih ada kredit-kredit ke sektor lain yang kami salurkan, tapi fokus kami tetap saja ada di perumahan.

Ketiga adalah reorientasi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kami akan mengarah ke pelayanan digital. Generasi X, Y, dan Z yang akan menjadi target pasar kita berikutnya karena adanya bonus demografi saat ini. Yang pasti, kalau orientasi kita tidak berubah, kita akan tertinggal.

Bagaimana dengan BTN?

Kami juga sedang mengarah ke standar global pada 2022 atau paling cepat pada 2020. Standar global ini bukan berarti Indonesia dimiliki oleh negara lain, melainkan kalau bisa perbankan Indonesia yang membuka cabang di negara lain. Kami harus bisa bekerja sama dengan negara lain. Bicara standar global, bukan hanya membangun Indonesia, melainkan harus bisa membangun ASEAN. Saat ini sudah ada pengakuan internasional bahwa BTN adalah bank satu-satunya dari dalam negeri yang akan menjadi *top 50* di Asia Tenggara.

Sebagai bankir, Anda juga sibuk di Perbanas. Apa saja yang Anda lakukan di sana?

Saya sebagai anggota dari bidang hukum dan pengaturan Perbanas. Ada satu hal yang sedang saya lakukan di sana, yaitu menguatkan konsolidasi internal antar-Perbanas. Ini memang terkait

Perbankan harus siap menghadapi reformasi industri dengan menyiapkan reposisi, refocusing, dan reorientasi.

dengan kerja sama dengan bidang lain dan hubungan kelembagaan, baik itu internal Perbanas, IBI, maupun Perbanas daerah.

Sebagai sebuah organisasi, kami selalu membuat laporan kegiatan setiap tahunnya. Tapi, laporan ini sekadar laporan dan kurang kuat pertanggungjawabannya. Kami ingin laporan ini jelas tujuannya dan kalau bisa diaudit karena ada iuran anggota di dalamnya. Hal ini sedang dimintakan

pengakuan dan penguatan kepada regulator.

Saya ingin semua organisasi ini kuat dan punya tim perumus kebijakan nasional. Nantinya, tim ini yang akan menjadi mitra kritis regulator dalam membuat kebijakan mengenai peraturan atau produk. Tim ini akan menjadi *think tank* Perbanas. Tim ini juga yang akan mencerminkan suara Perbanas sebagai sebuah organisasi.

Program apa saja yang sedang Anda jalankan?

Saya sedang menjalankan penguatan kelembagaan, menata kembali efektivitas dan hubungan kerja antarbadan atau organisasi yang ada di bawah Rapat Umum Anggota (RUA). Ke depannya, Perbanas harus bisa menjadi satu-satunya wadah organisasi di industri perbankan. Nantinya,

Asbanda, Himbara, Perbarindo, dan Asbisindo ada di dalam Perbanas. Sekarang ini mereka seperti berdiri sendiri-sendiri. Penguatan Perbanas ini juga harus didukung oleh regulator. Undang-undang perbankan juga harus menyebutkan bahwa lembaga yang resmi itu ialah Perbanas.

Apa yang melatarbelakangi Anda terkait dengan penguatan organisasi ini?

Saya pernah berada di lingkungan regulator. Saya pernah di BI dan saya juga pernah di OJK. Selama ini bank itu dianggap sebagai objek yang harus patuh kepada regulator. Setelah saya ada di posisi yang sebaliknya, ternyata eksekutor di sektor perbankan itu tidak mudah. Yang ada, malah kami terbelenggu dengan regulasi sehingga setiap langkah yang kami lakukan itu sulit.

Jadi, saya sadar, kalau mau membuat aturan itu harus konsultasi dengan pelaku industri. Ini juga tidak bisa dilakukan sebentar. Harus ada uji coba untuk yang kecil maupun yang besar. Belum lagi implementasi yang harus dilakukan ke semua cabang. Jadi, kami kejar-kejaran dengan aturan, bukan bisnis. ■



Menunggu Kejelasan Holding Bank BUMN

Holding bank BUMN telah dirumuskan sejak tahun lalu dan ditargetkan terealisasi tahun ini. Namun, hingga saat ini, arahnya masih belum jelas.

Wacana penggabungan bank-bank milik pemerintah (badan usaha milik negara atau BUMN) sejatinya telah mengemuka sejak beberapa waktu lalu. Namun, selalu kandas di tengah jalan. Penyebabnya banyak, mulai dari penolakan karyawan hingga *stakeholders* terkait.

Dalam perjalanan berikutnya, penggabungan bank berganti menjadi pembentukan *holding* (induk perusahaan). Pemerintah pun mulai merancang pembentukan *holding* bank-bank BUMN, yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Regulasi tersebut dinilai sebagai landasan hukum pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk merealisasikan pembentukan *holding* BUMN, termasuk bank BUMN.

Lantas, apakah bank-bank BUMN sudah siap dan memenuhi syarat? Menurut Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), fokus utama *holding* pada dasarnya menguatkan perbankan nasional, khususnya BUMN, dalam persaingan di Asia, bahkan di dunia, dari sisi aset. Namun, hal itu dinilai belum menjamin perbankan kita bisa bersaing dengan bank-bank di luar negeri.



Layanan salah satu bank BUMN; menguatkan perbankan nasional

Pasalnya, perhatian pemerintah terhadap kebijakan perbankan di Indonesia belum jelas arahnya, terlebih setelah munculnya pengelompokan bank seperti bank umum kegiatan usaha (BUKU) 1 hingga 4. Padahal, sudah ada Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, serta tatanan industri perbankan ke depan.

“Jadi, pemerintah harus jelas dulu, ke depan fokus perbankan kita mau dibuat seperti apa. Misalnya, mau dibuat bank khusus, seperti BTN mau dikhususkan bank KPR (kredit pemilikan rumah), BRI di KUR (Kredit Usaha Rakyat). Nah, Bank Mandiri dan BNI ini belum jelas mau diapakan,” tutur Enny.

Sebelum pembentukan *holding* BUMN, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah konsolidasi perbankan dan menguatkan posisi bank. Apalagi, sumbangsih perbankan nasional terhadap perekonomian negeri ini masih di bawah 40%. Jumlah itu terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang bisa mencapai 100%. “Dengan konsolidasi, diharapkan ke depan bank BUMN bisa menjadi *role model* buat bank-bank lain,” tambahnya.

Enny sendiri hingga saat ini tidak yakin akan arah kebijakan pemerintah ke depan. Karena, tak mudah mendorong bank sebagai lembaga intermediasi untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi ke depan. Di lain sisi, Kementerian BUMN menargetkan pembentukan *holding* bank BUMN bisa terealisasi tahun ini.

Menurut Gatot Trihargo, Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, setelah PP Nomor 72 Tahun 2016 keluar, pemerintah akan membuat aturan tambahan sebagai landasan aturan *holding* perbankan. Saat ini proses pembentukan *holding* bank BUMN sudah dalam tahap finalisasi konsep *holding*. “Nantinya aturan tambahan ini juga dalam bentuk PP dan akan mengatur khusus mengenai *holding* perbankan,” ungkapnya.

Terkait dengan perusahaan yang akan menjadi *holding*, menurut Gatot, masih sesuai dengan arahan dan rencana awal,



Rini Soemarno; terealisasi tahun ini

yakni PT Danareksa (Persero). Perusahaan ini akan menjadi *holding* yang menaungi semua BUMN di bidang jasa keuangan, termasuk perbankan.

Berdasarkan informasi, pembentukan *holding* bank BUMN berlarut-larut lantaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) belum menyepakati kebijakan yang dilansir pemerintah. Pasalnya, PP Nomor 72 Tahun 2016 dianggap akan menghilangkan peran DPR.

Menurut informasi yang diterima *Probank*, realisasi pembentukan *holding* bank-bank BUMN tahun ini bakal tertunda—paling cepat pada 2018 mendatang. Pasalnya, realisasi *holding* belum mendapatkan persetujuan DPR dan Kementerian Keuangan. Hubungan Menteri BUMN dengan DPR masih kurang harmonis. Ditambah lagi, masih ada beberapa hal yang masih harus

disesuaikan persepsinya.

Namun demikian, Rini Soemarno, Menteri Negara BUMN, optimistis *holding* BUMN akan terealisasi tahun ini. Terutama, setelah rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) bank-bank BUMN. Berdasarkan kajian Biro Riset Infobank (birI), jika digabungkan, aset keempat bank BUMN (data laporan keuangan per Desember 2016) diperkirakan mencapai Rp2.661,19 triliun atau 41,10% dari total aset perbankan yang per Desember 2016 tercatat Rp6.475,62 triliun. ■

Meningkatkan Pembiayaan Infrastruktur

Jika terealisasi, *holding* bank BUMN akan memberikan dampak pada sisi pembiayaan, khususnya pembiayaan infrastruktur. Pembentukan *holding* juga dinilai dapat menghemat biaya operasional perbankan. Salah satunya, biaya pembiayaan yang selama ini dibayarkan kepada perusahaan prinsipal asing, seperti Visa dan MasterCard.

Anton Gunawan, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, menyebutkan, perbankan Indonesia baru memenuhi 45% dari total kebutuhan pembelanjaan infrastruktur nasional sebesar Rp1.000 triliun per tahun. Menurutnya, jumlah tersebut dapat meningkat jika *holding* jasa keuangan, khususnya perbankan, dilakukan. “Bank itu punya batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Jadi, otomatis tidak akan ter-*cover* sepenuhnya,” terangnya.

Sesuai dengan ketentuan BMPK, pemberian kredit perbankan maksimal 10% dari modal bank kepada pihak terkait, sementara kepada pihak tidak terkait maksimum

20% dari modal bank. “Kalau *holding*, otomatis dari sisi permodalan makin besar, kredit pun bisa lebih banyak,” tuturnya.

Sebagai catatan, saat ini opsi sumber pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur antara lain penempatan dana pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha milik negara (BUMN) di bank BUMN. Selain itu, penerbitan surat berharga di pasar domestik dan internasional, pinjaman bank asing, pinjaman lembaga multilateral, dan realokasi aset produktif bank.

Adapun, pembiayaan infrastruktur sampai dengan 2019 diperoleh dari kontribusi APBN sebesar Rp2.215,6 triliun, kontribusi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Rp545,3 triliun, kontribusi BUMN Rp1.066,2 triliun, dan kontribusi swasta Rp1.692,3 triliun. Dari total kontribusi BUMN sebesar Rp1.066,2 triliun, sebanyak Rp202 triliun merupakan kontribusi bank BUMN.

Mengerem Laju NPL

NPL perbankan merayap naik dari 2014 hingga 2016. Sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi penyumbang kredit bermasalah paling besar dibandingkan dengan sektor lain.



Kegiatan ekspor di pelabuhan; kredit ekspor tumbuh

Mengawali 2017, pelaku bisnis perbankan di Tanah Air dihadapkan pada persoalan angka kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)* yang cukup tinggi. Bank Indonesia (BI) mencatat, angka NPL perbankan pada Januari 2017 sebesar 3,1%. Sebuah pekerjaan rumah bagi pelaku bisnis perbankan untuk menurunkan angka kredit bermasalah ini.

Menurut Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI, kenaikan NPL dari Desember ke Januari tahun berikutnya memang sudah menjadi tren. Seperti halnya pada Januari 2017 ini. Namun, Agus meyakini angka NPL akan kembali turun menjelang akhir 2017.

Menurunkan NPL menjadi kunci bagi perbankan untuk menurunkan suku bunganya. Bila perbankan mampu menurunkan NPL, ada kecenderungan suku bunga kredit akan turun. Jika likuiditas di pasar dalam kondisi baik, suku bunga kredit pun akan menurun. Memang butuh waktu sekitar satu hingga satu setengah tahun untuk mewujudkan hal itu.

Meningkatnya NPL perbankan dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh ekspansi kredit perbankan yang cukup besar sejak 2010. Menurut Joseph Pangaribuan, *Senior Investment Analyst* Samuel Asset Management, saat itu perbankan terlalu optimistis dengan kondisi ekonomi dalam beberapa tahun ke depan sehingga

mereka sangat agresif dalam menyalurkan kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, dalam lima tahun terakhir atau kurun waktu 2011-2016, perbankan Tanah Air memang cukup agresif mengucurkan kredit. Rata-rata pertumbuhan kredit setiap tahunnya sebesar 14,92%. Selama 2011-2013 pertumbuhan kredit setiap tahunnya malah di atas 20%. Perbankan sedikit mengerem ekspansi kreditnya memasuki 2014. Hingga akhir 2014, kredit perbankan tumbuh 11,58%. Penetrasi kredit terus melambat dan pada 2016 kredit perbankan hanya tumbuh 7,87% dibandingkan dengan 2015.

Melemahnya kondisi perekonomian global memang berpengaruh pada perekonomian Indonesia yang berujung pada menurunnya penetrasi kredit perbankan. Namun, menurut hasil kajian BI, kondisi perekonomian Indonesia pada triwulan kedua 2016 mulai menggeliat. Kegiatan bisnis pun mulai bergerak.

Ada beberapa parameter yang mengindikasikan bahwa kegiatan bisnis mulai mengalami kenaikan. Hasil Survei Kegiatan Usaha (SKU) BI, saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada triwulan kedua 2016 sebesar 18,40%. Padahal, pada triwulan keempat 2015, angka SBT masih pada posisi 3,02%. Pada pertengahan Februari 2017 belum ada

PERKEMBANGAN NILAI DAN KREDIT EKSPOR - IMPOR

2014 - 2016
(Rp Miliar)

Keterangan	2014	2015	▲(%)	2016	▲(%)
- Ekspor					
* Nilai Ekspor	2.189.202	2.001.075	-8,59	1.922.871	-3,91
* Kredit Ekspor	61.014	93.281	52,88	96.852	3,83
* NPL	2.224	2.327	4,63	2.059	-11,52
- Impor					
* Nilai Impor	2.216.544	1.898.982	-14,33	1.805.268	-4,93
* Kredit Impor	56.049	62.694	11,86	44.759	-28,61
* NPL	636	2.325	265,57	1.189	-48,86
- Lainnya					
* Kredit Lain-lain	3.557.246	3.901.930	9,69	4.235.584	8,55
* NPL	76.528	96.281	25,81	124.888	29,71
Total Kredit	3.674.309	4.057.905	10,44	4.377.195	7,87
Total NPL	79.388	100.933	27,14	128.136	26,95
NPL (%)	2,16	2,49		2,93	

Keterangan:

- NPL : *non performing loan*;

- ▲ : pertumbuhan.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah kembali oleh Biro Riset infobank (birl).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah kembali oleh Biro Riset Infobank.

hasil survei kegiatan usaha hingga triwulan ketiga 2016. BI memperkirakan angka SBT ini kembali menurun pada triwulan ketiga 2016. Situasi ini menyebabkan perbankan belum bisa menggenjot ekspansi kreditnya seperti lima tahun lalu.

NPL Kredit

Dalam kurun waktu 2011-2016, selain melambatnya kucuran kredit, perbankan dihadapkan pada meningkatnya *NPL*. Pada 2012 dan 2013 *NPL* perbankan sempat turun ke posisi 1,87% dan 1,77%. Sebelumnya, yakni pada 2011, *NPL* berada di posisi 2,17%. *NPL* terus merangkak naik pada 2014 hingga 2016. Angka *NPL* pada 2016 sebesar 2,93% dan merupakan yang tertinggi dalam rentang 2011-2016.

Terkait dengan pertumbuhan kredit, berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit konsumsi pada 2016 masih yang paling tinggi dibandingkan dengan kredit modal kerja dan investasi. Pada periode ini kredit konsumsi perbankan nasional tumbuh 8,76%, sementara kredit modal kerja dan investasi masing-masing tumbuh 6,93% dan 8,65%. Meski kucuran kredit konsumsi paling deras dibandingkan dengan kredit lainnya, *NPL* kredit konsumsi paling rendah dibandingkan dengan kredit modal kerja dan kredit investasi. Pada 2016 kredit konsumsi membukukan *NPL* sebesar 0,42%, sementara kredit modal kerja dan kredit investasi berturut-turut *NPL*-nya 1,68% dan 0,83%.

Pada Juni 2015 BI menggulirkan kebijakan yang mengatur besaran kredit dan uang muka untuk pembiayaan properti dan kendaraan bermotor. Kebijakan yang dikemas dalam PBI Nomor 17/10/PBI/2015 itu pada prinsipnya memagari bank supaya lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, dalam hal ini kredit kepemilikan properti dan kendaraan bermotor. Boleh jadi aturan ini menjadi salah satu pengendali *NPL* kredit konsumsi pada 2016. Namun, pada Agustus 2016 BI merevisi aturan tersebut melalui PBI Nomor 18/16/PBI/2016. Dalam kebijakan yang baru ini BI lebih melonggarkan *loan to value ratio (LTV)*. Bank-bank mengkhawatirkan aturan yang digulirkan pada 2015 menghambat perbankan dalam mengucurkan kredit properti dan kendaraan bermotor.

Terkait dengan kredit berorientasi ekspor, faktor perekonomian global yang masih melemah ternyata berdampak pada nilai ekspor Indonesia. Permintaan untuk produk-produk Indonesia di pasar dunia menurun. Alhasil, kredit untuk sektor berorientasi ekspor pun melambat pertumbuhannya. Pada 2016 kredit ekspor hanya tumbuh 3,83% dibandingkan dengan 2015. Padahal, pada 2015 kredit ekspor mampu tumbuh hingga 52,88%. Melambatnya kredit ekspor ini sejalan dengan nilai ekspor pada 2016 yang turun 3,91%.

Bagaimana dengan kredit impor? Kredit impor pada 2016 malah turun 28,61%. Namun, sektor yang berpotensi impor mampu menekan *NPL* kreditnya hingga 48,86%, sementara *NPL* kredit ekspor hanya turun 11,52%.

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit di sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang nilai *NPL* paling besar. Pada 2016 kredit sektor perdagangan besar dan eceran mencapai Rp841,38 triliun, sementara *NPL*-nya mencapai Rp35,789 triliun. Penyumbang *NPL* terbesar berikutnya ialah industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Dua sektor tadi berturut-turut menyumbang *NPL* sebesar Rp26,92 triliun dan Rp9,04 triliun.

Bagi industri perbankan, sektor perdagangan memang masih menjadi incaran untuk pasar kredit. Bank Bukopin adalah salah satu bank yang porsi kredit untuk sektor perdagangan cukup besar pada 2016. Sektor berikutnya yang menjadi sasaran kredit Bank Bukopin ialah konstruksi dan infrastruktur.

Menurut data OJK, sektor konstruksi menempati urutan kelima penyumbang *NPL* terbesar. Pada 2016 *NPL* sektor konstruksi mencapai Rp8,28 triliun atau naik 18,19% dibandingkan dengan *NPL* pada 2015. Dengan menysasar sektor perdagangan, konstruksi dan infrastruktur, pada 2016 *NPL (gross)* Bank Bukopin masih berada di posisi 2,9%. Untuk menekan *NPL* pada 2017, Adhi Brahmantya, Direktur Pengembangan Bisnis Bank Bukopin, mengatakan kepada *Probank*, Bank Bukopin akan mengalihkan sasaran penyaluran kredit dari sektor perdagangan ke sektor manufaktur.

Bank-bank yang akan mengalihkan porsi kreditnya ke sektor manufaktur harus berhati-hati. Sebab, menurut catatan OJK seperti disebutkan di atas, industri pengolahan (manufaktur) memberikan kontribusi *NPL* terbesar kedua setelah sektor perdagangan. Kemampuan bank-bank dalam memilah sektor mana yang akan dibiayai setidaknya akan mengerem *NPL* perbankan sepanjang 2017. ■

Perbankan Siap Implementasikan AEOI

Perbankan nasional sejatinya telah menyiapkan implementasi AEOI sejak diberlakukannya FATCA pada 2015. Implementasi AEOI diharapkan memberikan manfaat bagi industri perbankan nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mengimplementasikan Automatic Exchange of Information (AEOI). Industri perbankan Tanah Air pun telah menyiapkan sejumlah langkah sebagai upaya persiapan pelaksanaan AEOI pada 2018 mendatang. Di antaranya, dengan terlebih dahulu menerapkan sistem, *standard operating procedure* (SOP), dan pelaporan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA).

Sebenarnya, industri perbankan nasional sudah mengantisipasi penerapan sistem penyampaian informasi nasabah asing sejak diberlakukannya Foreign Account Tax Compliance Action (FATCA) pada 2015. Dalam perjanjian tersebut, perbankan Indonesia wajib melaporkan data rekening warga Amerika Serikat (AS) kepada otoritas pajak AS.

Anika Faisal, Sekretaris Jenderal Perbanas, mengatakan, industri perbankan di Tanah Air dinilai sudah cukup siap untuk mengimplementasikan AEOI. “Sistem AEOI ini sebenarnya bermula pada saat Amerika Serikat menetapkan FATCA, dan G-20 dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengadopsi sistem tersebut untuk diterapkan di negara-negara anggotanya. Jadi, sebenarnya, perbankan sendiri sudah siap dan terbiasa dengan sistem ini melalui SIPINA, dan akan dikembangkan oleh OJK tentang peraturannya,” terangnya.

Menurut Anika, peraturan tersebut memang perlu dilakukan. Selain karena jumlah nasabah dan negaranya yang bertambah banyak, isi setiap peraturan juga patut dikaji agar tidak terjadi kesalahpahaman antara perbankan dengan peraturan yang telah dibuat. Dalam urusan membuat laporan sendiri, perbankan sudah sangat paham dan bukan masalah besar. “Kami sudah terbiasa membuat laporan informasi nasabah sejak saat diberlakukannya FATCA. Jadi, tidak terlalu kaget dengan implementasi AEOI ini,” ungkapnya.

Saat ini perbankan masih menunggu revisi aturan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25/POJK.03/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125 Tahun 2015. Perbankan juga menunggu peraturan yang dicanangkan oleh 101 negara yang tergabung dalam OECD agar dapat mengimplementasikan AEOI dengan baik pada 2018.



Front office sebuah bank; menunggu peraturan

OJK Menyiapkan Aturan

Terkait dengan AEOI, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan peraturan, yaitu POJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. OJK juga telah membangun sistem pelaporan yang diberi nama SIPINA sebagai sarana untuk penyampaian informasi keuangan nasabah asing.

SIPINA sudah selesai dibangun pada akhir 2016 dalam rangka mendukung implementasi FATCA. Sehingga, segera setelah penandatanganan Intergovernmental Agreement (IGA) dengan Pemerintah AS, lembaga jasa keuangan dapat memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam IGA.

Saat ini OJK tengah menyiapkan sejumlah peraturan di sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan AEOI yang akan mulai diimplementasikan pada September 2018. “OJK sebagai otoritas lembaga jasa keuangan mendukung implementasi AEOI sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan saat ini,” ujar Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK.

OJK juga sedang menyiapkan ketentuan pelaksanaan lebih lanjut berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang khusus mengatur AEIOI. Aturan ini nantinya antara lain akan mengatur tata cara pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) kepada nasabah asing dan tata cara penyampaian informasi keuangan nasabah asing kepada otoritas pajak.

Menurut Muliawan, salah satu wujud dukungan tersebut adalah dengan menyiapkan peraturan bagi lembaga jasa keuangan agar dapat menyampaikan data nasabah untuk dipertukarkan informasinya dalam rangka pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Penerapan AEIOI diharapkan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Di antaranya, pemerintah dapat memperoleh informasi keuangan dari setiap wajib pajak Indonesia yang masih menanamkan dananya di negara mitra atau yurisdiksi mitra secara resiprokal.

Di samping itu, terkait dengan persiapan implementasi pelaporan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan OJK telah meluncurkan sistem izin pembukaan rahasia penyimpanan nasabah untuk tujuan perpajakan. Sistem ini terdiri atas dua aplikasi, yakni Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia) bagi internal Kemenkeu dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab) bagi internal OJK.

Akasia-Akrab terhubung dalam satu sistem sehingga waktu pemrosesan perintah pembukaan rahasia bank menjadi lebih efisien. Sebagai pembanding, secara manual, lama waktu hingga keluar surat perintah pembukaan rahasia kepada bank rata-rata mencapai 239 hari per permohonan. Sedangkan,

melalui aplikasi Akasia-Akrab, lama waktu hingga keluar surat perintah pembukaan rahasia menjadi 14 hari. Sistem tersebut juga memiliki fitur seleksi otomatis terhadap permintaan yang tak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mempercepat proses dan sistem pengelompokan permintaan terhadap bank.

Dengan fitur tersebut, jumlah surat perintah yang ditandatangani menjadi berkurang, penelusuran surat jadi makin mudah, dan tersedia statistik data bank penerima perintah pembukaan rahasia bank. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, Akasia-Akrab merupakan wujud konkret Indonesia dalam menyambut era keterbukaan informasi pada era AEIOI tahun depan.

“Kalau kita tidak memiliki level yang sama dari sisi level otomatis, kita tidak mampu berada pada tahap yang sama dengan negara lain, dan kita akan merugi karena negara lain menganggap kita tidak bisa resiprokal (dalam pertukaran informasi),” tutur Sri Mulyani pada acara peluncuran di Kantor DJP, Senin (13/3).

Sementara itu, terkait dengan Undang-Undang (UU) Perbankan maupun UU Pasar Modal yang mengatur kerahasiaan bank dan kerahasiaan rekening nasabah di pasar modal, OJK berniat untuk menyelesaikan kendala tersebut. Rencananya, akan dilakukan revisi atas ketentuan dalam kedua UU tersebut. Khusus mengenai revisi UU Perbankan, saat ini sudah masuk dalam salah satu program legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). ■



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini Bank Jateng mengumumkan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tahun 2016 sebagai berikut:

Tahun 2016 : Rp 8.898.608.003,-

Rincian Piutang Yang Nyata Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.

Upaya Menjaga Likuiditas dan Kesehatan

BI berencana menerbitkan kebijakan mengenai dividen. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas dan kesehatan industri keuangan di Tanah Air.

BANK Indonesia (BI) akan menerbitkan aturan baru terkait dengan pengelolaan dividen yang disetorkan oleh korporasi, terutama lembaga keuangan, kepada pemegang saham. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kerangka makro prudensial di tengah makin kecilnya ruang pelonggaran moneter.

Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI, mengatakan kebijakan tersebut memang sedang menjadi salah satu perhatian utama bank sentral pada awal tahun ini. Menurutnya, BI ingin melihat dinamika kinerja dari setiap lembaga keuangan yang terjadi pada kuartal/triwulan pertama tahun ini.

Dia juga ingin melihat kesiapan industri apakah akan memiliki kecukupan dan ketahanan modal yang kuat ke depannya. Pasalnya, sepanjang 2017 ekonomi global dan domestik masih dibayangi ketidakpastian dan tekanan.

“Kami sedang melihat dan mau meyakinkan bahwa pembayaran dividen itu tentu suatu yang baik. Tapi, kami juga perlu menjaga kesehatan institusi agar institusi itu tetap siap untuk menghadapi tantangan pada 2017-2018-2019 ketika kondisi dunia masih dibayangi ketidakpastian,” ujarnya kepada wartawan.

Agus melanjutkan, BI sedang mengkaji secara intensif mengenai kebijakan pengelolaan dividen tersebut. Namun, dia enggan mengatakan secara rinci. Untuk besaran dividen, katanya, juga masih dikaji oleh kementerian dan lembaga terkait.

Menurutnya, rencana ini akan mampu menjaga likuiditas yang ada di setiap lembaga keuangan, di samping terobosan-terobosan lain yang sudah dilakukan. Selain itu, setiap lembaga keuangan harus memiliki neraca finansial yang baik. Hal ini dilakukan agar industri ini bisa tetap sehat.



RUPS sebuah bank; pengaturan setoran dividen perlu dikaji

“Masih kita bahas, tapi kita ingin menjaga agar lembaga keuangan punya neraca finansial yang kuat, kalau seandainya situasi yang penuh tantangan dan akan dilakukan pembayaran dividen yang lebih tentu akan membuat institusi itu lemah. *Nah*, kita mau jaga supaya mereka tetap sehat,” jelasnya.

Masih menurut Agus, pihaknya juga sedang melakukan diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai rencana kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut baru akan dikeluarkan ketika koordinasi antarlembaga sudah selesai dilakukan.

Di satu sisi, dia memahami kebijakan BI tersebut bisa memengaruhi penerimaan negara yang berasal dari dividen. Namun, Agus mengingatkan adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)* harus diantisipasi dengan baik. Hal itu juga akan mengurangi potensi pertumbuhan kredit ke depan. Karena itu, pengaturan setoran dividen perlu dikaji agar keuangan perbankan tetap sehat.

Di tempat yang sama, Junda Agung, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, mengatakan bahwa kebijakan tersebut lebih dikhususkan untuk lembaga keuangan seperti perbankan. Saat ini BI masih melakukan kajian dan terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Hal ini masih dikaji. Tentu saja terkait dengan hal ini, kita bekerja tidak sendirian. Kita selalu koordinasi dengan lembaga yang terkait. Yang pasti ini masih dalam kajian,” jelasnya.

Ketika disinggung apakah kebijakan tersebut untuk meningkatkan penerapan standar perbankan internasional Basel III di Indonesia, Agus belum mau berkomentar lebih jauh. Pasaunya, wacana kebijakan mengenai pengelolaan dividen ini masih sangat awal.

Sementara itu, Mirza Adityawasa, Deputi Gubernur Senior BI, mengungkapkan rencana kebijakan bank sentral tersebut bukanlah kebijakan jangka pendek BI. Bahkan, dia memastikan BI tidak akan merilis kebijakan tersebut pada tahun ini. “Masih terlalu awam kalau menanyakan tentang dividen karena itu masih kajian. Tidak (tahun ini),” ungkapnya.

Saat ini bank sentral tengah fokus memperhatikan likuiditas perbankan nasional. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, BI menganggap ruang pelonggaran kebijakan moneter makin sempit sehingga perlu terobosan kebijakan untuk memastikan likuiditas perbankan mencukupi.

“Jadi, walaupun misalnya suku bunga mungkin tidak ada lagi ruang pelonggaran, masih ada langkah dan ruang lain yang bisa dilakukan. Intinya, BI akan memastikan likuiditas perbankan tersedia,” ujarnya.

Dia melanjutkan, bank sentral sudah menempuh berbagai langkah dan kebijakan terkait dengan pengelolaan likuiditas,

seperti menurunkan giro wajib minimum (GWM) sebanyak dua kali. Upaya ini dilakukan agar ruang untuk menurunkan kewajiban perbankan tersebut masih tersedia. Masih ditambah lagi rencana penerapan GWM *averaging* pada triwulan kedua tahun ini.

Perlu Banyak Pertimbangan

Adanya wacana kebijakan yang akan dilansir bank sentral ternyata menyita banyak perhatian pihak lain. Meski bertujuan baik, rencana tersebut bisa berimbas pada menurunnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen bank BUMN.

Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, mengatakan kebijakan tersebut perlu dibicarakan lagi dengan pemerintah sebab menyangkut penerimaan negara. “Nanti tentunya harus bicara sama (Kementerian) Keuangan dan Kementerian BUMN juga,” ujar dia kepada wartawan.

Sekadar informasi, laba bersih bank-bank BUMN turun 6,71% dari Rp55,86 triliun pada 2015 menjadi Rp52,11 triliun tahun lalu. Penurunan laba tersebut seiring dengan melambatnya kinerja kredit perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan melambat lebih dalam dari 10,5% pada 2015 menjadi 7,87% pada tahun lalu.

Ke depan, Askolani mengatakan pemerintah harus mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan PNBP untuk mengejar pendapatan negara yang dipatok sebesar Rp1.750,3 triliun. Selain itu, untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada pada level yang aman, pemerintah juga harus memastikan alokasi belanja yang efisien dan efektif.

“Dengan jumlah (penerimaan) yang sama, kalau (dibelanjakan) lebih efektif akan lebih baik. Kemudian, uangnya akan kita pakai untuk pembangunan. Itu *multiplier* lebih baik tanpa harus menambah utang,” ujar Askolani. ■

Mengkaji Besaran Dividen

Perlambatan dan ketidakpastian ekonomi yang masih berlanjut berdampak pada kinerja sejumlah bank BUMN, yang menurun. Implikasi dari kondisi tersebut, setoran dividen perusahaan pelat merah untuk APBN 2017 akan merosot.

Sebagai informasi, setoran dividen bank-bank BUMN terus mengecil dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu bank BUMN menyumbang dividen Rp6,8 triliun atas laba 2015, di bawah setoran dividen tahun sebelumnya yang senilai Rp10,26 triliun.

Melihat hal itu, Gatot Trihargo, Deputi Bidang Jasa

Keuangan Kementerian BUMN, mengatakan pihaknya akan memeriksa kecukupan modal atau *capital adequacy ratio (CAR)* bank-bank BUMN sampai memenuhi ketentuan Basel III pada 2019. “Yang nantinya bertujuan penetapan *dividend pay out ratio* bisa pas untuk tiap-tiap banknya,” katanya.

Menurutnya, sensitivitas analisis tiap bank akan terus dipelajari dan dikaji. Hal ini dilakukan guna mengerek dividen sektor keuangan. Meski begitu, dia belum bisa menargetkan kapan langkah tersebut bisa mantap diselesaikan. “Yang penting target dividen yang harus disetor ke negara tercapai,” katanya.

Reformasi Kebijakan Pangan

Indonesia sejatinya mampu memiliki kemandirian dan ketahanan dalam sektor pertanian. Namun, ada sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Reformasi kebijakan pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan pengelolaan pangan yang terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi pangan untuk menjaga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan.

Hingga saat ini pengelolaan pangan nasional, mulai dari produksi, distribusi dan tata niaga, hingga harga pangan, dirasakan masih belum optimal. Gejala pasokan dan harga pangan, disparitas harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara *peer* maupun antardaerah mencerminkan bahwa regulasi dan insentif pemerintah pada sektor pertanian belum optimal. Di lain sisi, faktor risiko yang tinggi pada sektor pertanian mengakibatkan sumber pembiayaan bagi petani menjadi terbatas, yang kemudian mendorong ketergantungan petani pada sumber pembiayaan informal.

Dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Rakor Pusda) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) dengan tema “Mempercepat Reformasi Pangan dalam Rangka Menjamin Ketersediaan Pangan dan Keterjangkauan Harga bagi Masyarakat serta Mengurangi Kesenjangan Kesejahteraan”, dibahas reformasi kebijakan pangan. Reformasi pangan diarahkan untuk mengatasi lima tantangan utama.

Kelima tantangan itu ialah, satu, aspek peningkatan produksi dan pasokan, khususnya terkait dengan luas lahan, produktivitas, ketersediaan data, insentif bagi petani, dan kebijakan impor. Dua, aspek pemenuhan infrastruktur penunjang pertanian, terutama terkait dengan pengairan. Tiga, aspek akses pembiayaan karena masih lemahnya faktor kelembagaan petani. Empat, aspek distribusi, logistik dan tata niaga pangan. Lima, aspek efisiensi struktur pasar karena masih panjangnya rantai perdagangan komoditas pangan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, menurut Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, ada beberapa rekomendasi. Rekomendasi pertama, mendorong peningkatan produksi dan pasokan pangan melalui penerapan reformasi



Petani di sawah; klastering produksi pertanian

agraria sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi melalui pola klastering produksi pertanian. Selanjutnya, pengaturan waktu (*timing*) produksi beras untuk kebutuhan yang merata sepanjang tahun disertai dengan peningkatan kapasitas dan jumlah penyimpanan beras dan penambahan *dryer*. Selain itu, penugasan dan penunjukan wilayah atau daerah untuk melakukan produksi komoditas tertentu disertai dengan peningkatan peran daerah untuk berinovasi dalam peningkatan produksi pangan.

Rekomendasi kedua, memperkuat infrastruktur pertanian, yang diprioritaskan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur penunjang produksi pangan dan infrastruktur konektivitas sebagaimana tertuang dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Lalu, percepatan pembangunan dan perbaikan irigasi, terutama irigasi sekunder dan tersier untuk dapat mengairi seluruh sawah, terutama di daerah-daerah yang memiliki dampak pengganda produksi pangan yang lebih besar. Disertai juga dengan meningkatkan upaya fiskal dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Rekomendasi ketiga, mendorong peningkatan pembiayaan di sektor pertanian melalui perluasan dan peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor produksi primer hingga mencapai 40% dari total KUR yang disalurkan pada 2017 serta didukung perluasan asuransi pertanian. Dalam

hal ini upaya tersebut dilakukan melalui paket khusus pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap fiskal.

Seiring dengan itu, dilakukan pula pengaturan dan pengoptimalan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana desa untuk pembangunan infrastruktur pendukung produksi pertanian. Selain itu, penyelesaian program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) dalam tiga tahun.

Rekomendasi keempat, meningkatkan distribusi, logistik, dan perbaikan tata niaga pangan, yakni melalui pembenahan distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada penerapan sistem logistik dan distribusi yang terintegrasi, termasuk koordinasi antardaerah dan pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI). Selain itu, melakukan optimalisasi peran badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk meningkatkan distribusi komoditas pangan antardaerah, terutama dari daerah surplus ke daerah defisit pangan.

Dalam kesepakatan itu juga didorong upaya pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung optimalisasi distribusi pangan. Ditambah juga mengenai pengaturan distribusi pangan melalui penguatan pengaturan oleh pemerintah serta penetapan kebijakan impor yang tepat waktu dengan dukungan data sistem logistik dan distribusi.

Rekomendasi kelima, membenahi struktur pasar. Hal ini dilakukan melalui penguatan pengaturan distribusi pangan oleh pemerintah, pengaturan pelaku usaha distribusi terdaftar, dan *monitoring* harga sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara kawasan.

Di samping itu, optimalisasi peran Perum Bulog. Institusi

ini dimaksimalkan perannya sebagai lembaga penyangga untuk mendukung stabilisasi harga pangan, penyediaan alternatif pasokan komoditas strategis, seperti jagung, serta penguatan pemantauan harga dan pasokan dengan dukungan sistem informasi dan harga yang terintegrasi, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional.

Swasembada Pangan

Pangsa sektor pertanian dalam perekonomian nasional makin menurun disertai dengan menurunnya proporsi tenaga kerja pada sektor pertanian. Sementara itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian melalui pembangunan infrastruktur diperkirakan baru akan selesai pada tiga hingga lima tahun mendatang—hal ini terkait erat dengan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang tengah giat membangun infrastruktur, termasuk untuk sektor pertanian. Menurut BI, hasilnya baru akan dirasakan pada tiga sampai dengan lima tahun mendatang. Sehingga, target swasembada pangan pemerintah Jokowi baru akan terealisasi pada 2020 mendatang.

Hal itu juga tercermin dari riset bank sentral yang menyebutkan bahwa grafik kemampuan produksi pangan dalam negeri akan melewati pertumbuhan penduduk pada 2020. Dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah yang dilakukan secara masif, produksi beras nasional akan naik signifikan. Sementara itu, pertumbuhan penduduk kita rata-rata di 1%-2%. Sebagai informasi, berdasarkan data bank sentral, pada 2020 mendatang produksi beras akan mencapai 50 juta ton atau sesuai dengan kebutuhan penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 252 juta orang. ■



Bank Sahabat
Sampoerna

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK SAHABAT SAMPOERNA

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT Bank Sahabat Sampoerna mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

Tahun 2016 Rp. 121.707.139.884,-

Rincian Daftar Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagaimana tercatat di Bank Sahabat Sampoerna, akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat bersamaan dengan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagai Lampiran.

Meningkatkan Akses Pembiayaan Sektor Pertanian

Untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengelolaan sektor pertanian dibutuhkan modal yang besar. Karena itu, akses pembiayaan bagi petani harus ditingkatkan.

Meningkatkan produksi pertanian penting dilakukan untuk membangun ketahanan pangan nasional. Berbagai upaya perbaikan untuk mewujudkan hal itu memang telah dilakukan, misalnya dengan membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi para petani.

Salah satu langkah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi para petani ialah menguatkan kelembagaan petani dan pengelolaannya. Seperti yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan menginisiasi *corporate farming* melalui pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). “*Corporate farming* itu sebenarnya bagaimana pengelolaan lahan pertanian dilakukan dengan pola korporasi atau korporatif dengan profesional,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI, Dody Budi Waluyo.

Dengan adanya *corporate farming*, para petani dengan lahan terbatas disatukan dalam kontrak kerja sama, baik dalam sarana produksi, pola tanam, maupun pemasaran. “Kemudian, di situ ada *corporate management*, ada mekanisme pertanian, ada pembiayaan, pemasaran, dan pengelolaan pascapanen. Mereka bekerja sama dapat hamparan misalnya 50 ha, kemudian dikerjasamakan dalam BUMP tadi,” ungkap Dody.

Melalui pembentukan *corporate farming* ini, para petani juga akan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan dari lembaga formal karena skalanya lebih besar sehingga risiko pembiayaannya jadi lebih kecil. Sejauh ini perbankan melihat sektor pertanian memiliki risiko pembiayaan yang tinggi. Karena itu, pembiayaan ke sektor pertanian masih sangat rendah dibandingkan dengan ke sektor lain.

Berdasarkan catatan BI, tahun lalu mayoritas atau 55% petani padi memperoleh pembiayaan dari para tengkulak, pengijon, dan pembiayaan informal lainnya. Yang mendapatkan akses pembiayaan formal hanya 15%.

Selain itu, BI membuat *pilot project* bernama “Documenting Global Best Practices on Sustainable Models of Pro-Poor Rural Financial Services in Developing Countries (RuFBEP Project)”, kolaborasi antara Asia-Pacific Rural and



Tenaga kerja sektor pertanian; *corporate farming*

Agricultural Credit Association (APRACA) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Ada empat fase pelaksanaan proyek tersebut yang berlangsung dalam rentang 2014-2018. Fase pertama yang dimulai sejak 2014 ialah identifikasi *best practices* jasa layanan keuangan perdesaan yang dilaksanakan di lima negara (Thailand, Indonesia, Tiongkok, Filipina, dan India). Fase kedua

(2015-2016) merupakan *pilot project* dari *best practices* yang dilaksanakan di tiga negara (Indonesia, Tiongkok, dan Filipina). Fase ketiga merupakan diseminasi hasil *pilot project* dan merumuskan arah untuk mendorong penerapan *best practices*, dilanjutkan dengan fase keempat, yaitu diseminasi hasil RuFBEP Project dalam bentuk program pertukaran kunjungan.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya juga telah mengembangkan teknologi digital dalam pengembangan sektor pertanian. Dalam pengembangan teknologi ini para petani bisa mengakses informasi harga pasar komoditas. Hal ini dilakukan sebagai upaya memotong mata rantai tengkulak. Selain itu, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog), industri jasa keuangan, dan lembaga yang berkompeten telah menyusun buku panduan yang berisi data dan informasi, antara lain mengenai rantai nilai, model pembiayaan dan asuransi, serta peraturan dan *road map*.

“Jadi, mata rantai tengkulaknya itu kita putus. OJK berperan mendorong komoditas yang ada harganya bisa stabil. Kalau sudah stabil, inflasi juga stabil,” terang Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional OJK, Slamet Edy Purnomo.

Terkait dengan akses pembiayaan, menurut Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Rahmat Waluyanto, dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlu sinergi dari semua pihak terkait, termasuk dukungan dari sektor pembiayaan industri jasa keuangan. OJK mendorong peran industri jasa keuangan melalui perluasan akses pembiayaan. ■